**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat (bangsa). Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka lulusanya kurang sempurna kualitasnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikianlah yang diharapkan terbentuk dalam tata kehidupan bangsa indonesia agar mampu menghadapi persaingan dunia global.

1

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial yang baik. Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat di pengaruhi oleh semua warga sekolah dan mitranya. Kondisi tersebut menunjukan bahwa berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misinya terletak pada bagaimana manajemennnya. dalam menggerakan dan memperdayakan berbagai komponen sekolah. Dalam prosesnya interaksi yang berkualitas dan dinamis antara kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga administrasi, dan masyarakat memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam penyesuaian berbagai aktivitas sekolah dengan tuntutan globalisasi. Semua ini sangat menuntut kompetensi dan profesionalitas pihak-pihak yang terkait, untuk memungkinkan terciptanya interaksi berkualiats yang dinamis.

Sekolah merupakan salah satu unit yang sangat keberadaanya tidak bisa di lepaskan oleh masyarakat, sekolah dibuat untuk kepentingan masyarakat sebab sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mana mampu melahirkan insan sejati, yang mampu menjawab tantangan global, menciptakan manusia yang berwawasan global, berperilaku lokal dan bersifat nasional. Oleh sebab itu, program pengembangan sekolah harus di orientasikan agar peserta didik mampu berperan dalam kehidupan sehari-hari dilinkungannya. Selain tuntutan global dan nasional, sekolah juga dihadapkan pada berbagai macam tuntutan lokal, sehingga kepedulian masyarakat terhadap pengembangan sekolah yang efektif menjadi sangat signifkan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat yang mutlak. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan, oleh karena itu kualitas pendidikan harus senangtiasa ditingkatkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan proses peningkatan kualitas pendidikan. Namun pendidikan nasional kita baik sekolah negeri maupun swasta memiliki sejumlah masalah, salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya, mengembangkan kurikulum nasional dan lokal, meningkatkan kopetensi guru melalui pelatihan, mengadakan buku dan alat pelajaran, mengadakan dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti.

Berbagai kenyataan tidak optimalnya mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah manajemen pendidikan. Dalam kenyataannya, manajemen pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, kurang berdaya, kurang mandiri, dan bahkan terpasung kreativitasnya. Untuk itu, Kemendiknas terdorong untuk melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). MPMBS pada dasarnya adalah bagian dari MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Fokus dari MPMBS terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah.

Calwell dan Spinks (Mulyasa, 2011:177) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan:

Sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepala sekolah untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Dalam MPMBS sekolah merupakan institusi yang memiliki “*Full authority and Responsibility”* untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah.

Sedangkan Mulyasa (2011:178-179) mengemukakan ada beberapa ciri-ciri sekolah yang mandiri sebagai berikut:

Tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan randah, bersifat adaptif dan antisifatif/proaktif sekaligus, memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya), bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.

Dari pengertian tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah terdapat juga tujuan di lakukanya manajemen berbasis sekolah/manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah oleh pemerintah.

Mulyasa (2011:179) tujuan MPMBS antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiataf sekolah dalam mengelolah dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
4. Meningkatkan kompetesi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Seiring dengan reformasi pendidikan yang diilhami oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pemerintah memberikan kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta dengan pendekatan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat. Praktek *school-based Management* yang sesungguhnya perlu diimplementasikan pada semua sekolah. Perjalanan untuk memperoleh predikat sebagai sekolah unggulan tentu memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari setiap individu yang ada disekolah. Tentunya banyak persoalan yang dihadapi oleh kepala sekolah, para pendidik serta tenaga kependidikan yang ada disekolah. Penelitian perlu segera diadakan untuk menjawab semua permasalahan di atas. Terjawabnya permasalahan tersebut akan membantu pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan kita.

MPMBS telah banyak diterapkan di sekolah bukan hanya di negara maju tetapi juga telah menyebar di negara-negara sedang berkembang. Penerapan MPMBS telah banyak menjanjikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Penerapan MPMBS akan berhasil jika diberikan prakondisi dengan membangun kapasitas dan komitmen sekolah, termasuk semua pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab bersama terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan sekolah dalam menerapkan MPMBS amat dipengaruhi oleh kepedulian pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong dan memberikan kesempatan sekolah menerapkan MBS di sekolah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone diperoleh informasi dari seorang pegawai yang berinisial AA bahwa penerapan MBS/MPMBS di sekolah tersebut sudah lama telah diterapkan dan dikelola dengan baik oleh seluruh personil sekolah. Hal ini dapat dilihat dari prestasi sekolah yang masuk dalam sekolah RSMABI (Rintisan SMA Berbasis Internasional) dan menjadi salah satu sekolah favorit di Kabupaten Bone.

Seiring dengan desentralisasi, otonomi dalam pengelolaan pendidikan dan penyiapan sumberdaya manusia untuk menghadapi tantangan global pada abat modern dan teknologi ini. SMA Negeri 1 Tellu Siattingge mempunyai peran yang sangat penting. SMA Negeri 1 Tellu Siattingge merupakan sekolah berakreditasi A, unggul dan maju dalam pembelajarannya. SMA Negeri 1 Tellu Siattingge harus menghadapi tantangan yang semakit berat sejalan dengan perubahan masyarakat yang semakit cepat. Agar mampu mempertahankan kepercayaan umat, SMA Negeri 1 Tellu Siattingge harus tetap mempertahankan dan meningkatkan mutu secara efektif dan efesien.

Untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan yang mampu melakukan proses belajar yang efektif dan menghasilkan output yang bermutu, maka perlu diadakan tindakan yang terencana dengan baik, terutama manajemennya. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat sangat membantu penyelenggaraan pendidikan disekolah SMA Negeri 1 Tellu Siattingge.

Penelitian ini bukanlah hal yang baru, dan sudah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian ini, antara lain: (1) Riyanto (2009), implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) di SMA Negeri 2 Temanggung Tahun ajaran 2008/2009. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini bahwasanya kesiapan sumber daya secara keseluruhan sudah mendukung untuk mengimplementasikan MPMBS, baik sumber daya manusia (kepala sekolah dan guru) maupun sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah yang kondusif untuk pengembangan program MPMBS. Proses implementsi MPMBS di SMA Negeri 2 Temanggung dapat dikatakan cukup efektif dan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa, pihak sekolah memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan serta mendorong memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik. (2) Marsini (2013), implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Sukoharko telah dilaksanakan dengan baik. Faktor pendukung pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah SDM yang bagus dalam melaksanakan tugas masing-masing yaitu kepala sekolah, wakasek, guru, karyawan, dan siswa. Selain itu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk KBM. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya pendanaan untuk pengembangan sekolah serta kurangnya peran komite sekolah. (3) Ngadimun (2012), kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (Studi efektifitas implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di Kota Banjarmasin). Penelitian ini membahas tentang bagaiamana efektifitas implementasi kebijakan implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan MPMBS, dengan hasil penelitiannya yaitu efektifitas kebijakan implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di Kota Banjarmasin dicapai dengan sesuai tujuan dari kebijakan MPMBS meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan perubahan terhadap manajemen pendidikan dari pola lama ke pola MPMBS dan dilakukan sosialisasi kebijakan MPMBS melalui berbagai media, serta ketersediaan sumberdaya pendukung kebijakan.

Sehubungan dengan permasalahan yang dipaparkan, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih ilmiah dengan judul **Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone.**

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

1. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan pada umumnya semua institusi pendidikan di indonesia.

1. Manfaat Teoretis
2. Penelitian ini diharapkan menambah bahan kajian khususnya mengenai implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone dan seluruh intitusi pendidikan pada umumnya.
3. Untuk peneliti, selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam lagi tentang implementasi MPMBS,
4. Manfaat praktis

Dapat menjadi masukan atau informasi bagi stakeholder dalam mengimplementasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dijenjang sekolah menengah atas maupun seluruh jenjang institusi pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

1. Bagi sekolah, dapat mandiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya,
2. Bagi guru, agar dapat menciptakan kerjasama yang kondusif antara sesama komunitas sekolah, untuk memajukan sekolahnya.
3. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai momentum untuk melatih kemampuan penulisan karya ilmiah dan begitupun bagi peneliti lain dapat menjadikannya sebagai bahan perbandingan dan rujukan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Pengertian Manajemen**

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu yang digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* di terjamahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage,* dengan kata benda *management,* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegitan manajemen. Akhirnya *management* di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Manajemen, sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang. Disebut seseorang ialah menejer, ialah seseorang yang di tempatkan dalam suatu posisi, yang harus menjamin perubahan-perubahan pola-pola perilaku orang lain dengan tujuan mencapai sasaran yang dipercayakan kepadanya. Manajemen merupakan seni pembimbingan kegiatan-kegiatan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum.

11

Terry (Rochaeti dan Rahayunigsih:2005:4) mengemukakan bahwa:

Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya yang ada.

Sementara itu Hasibuan (2014:255),”Manajemen adalah ilmu dan seni menagatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu”. Kemudian Atmodiwiro (Suharsaputra:2013:13),”Manajemen Pendidikan dapat di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan”.

Selanjutnya Parker (Usman, 2009:5) mengungkapkan manajemen adalah“seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*)”. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing, namun tidak satupun yang memuaskan. Walaupun demikian, esensi manajemen dapat dipandang, baik seperti proses, fungsi maupun sebagai tugas.

Usman (2009:7) mengatakan bahwa manajemen pendidikan adalah:

Seni dan ilmu mengelolah sumberdaya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penegendalian diri, kepribidian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Beberapa para ahli berargumentasi, bahwa proses manajemen sangat halus dan tidak terpisah, sehingga tidak dapat dianalisakan ke dalam komponen-komponen. Kenyataanya, memang terdapat beberapa para ahli yang yakin, bahwa proses manajemen merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat di bagi-bagi. Kendatipun demikian, untuk tujuan-tujuan studi dan pembahasan, suatu analisa kedalam unsur-unsur komponen dapat dilakukan dan membantu.

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas Hamalik (1991:20) mengatakan ada dua jenis pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari manajemen, yakni :

1. Memperlihatkan proses-proses administratif, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi
2. Mempelajari sub sistem organisasi yang meliputi tugas- tugas:
3. Strategi: menghubungkan organisasi dengan lingkungan, dan mendesasian secara komprehensif sistem dan rencana
4. Koordinasi: mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di dalam organisasi
5. Operasi: melaksanakan pencapaian tujuan-tujuan secara efekktif dan efesien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kekuatan utama dalam organisasi mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan dan menghubungkannya dengan lingkungan. Manajemen merupakan suatu proses dimana sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan yang lainnya lalu diintegrasikan menjadi suatu sistem menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Handoko (2003:25) Dalam proses manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen yakni:

1. Perencanaan (*planning*), adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhakn untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organizing*), adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, perencanaan dan pengembangan suatu kelompok kerja, penugasan tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya.
3. Pengarahan (*leading*), fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan, seperti komunikasi, motivasi dan disiplin.
4. Pengawasan (*controlling*), adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Purwanto (Husain 2011:7) yaitu ”adapun proses manajemen pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, organisasi, koordinasi, komunikasi, supervisi/pengawasan, pembiayaan dan evaluasi”. Sedangkan Sutisna (Husain, 2011:7) mengukakan bahwa ”fungsi-fungsi pokok manajemen itu meliputi: planning, allocating, stimulating, coordinating, dan evaluating”.

Dari beberapa pendapat tersebut, bahwa pengertian manajemen adalah kegiatan yang penting dilakukan dalam suatu manajemen organisasi yang mempunyai peranan dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1. **Manajemen Berbasis Sekolah**
2. **Pengertian manajemen berbasis sekolah**

Mulyasa (2002) “Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “*school-based management”*. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat”. Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) telah berhasil dinegara-negara maju, tetapi masih merupakan konsep baru bagi negara kita yaitu Indonesia. Oleh karena itu tidak secara otomatis sempurna, untuk menyempurnakannya, peraktisi pendidikan perlu melakukan langkah nyata, merivisi sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah dibidang pendidikan dan telah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah”. Oleh karena itu MBS wajib diketahui, diamalkan oleh warga Negara Indonesia terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian Mulyasa (2011:24) MBS merupakan “paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan masyarakat) dalam rangka kebijakan pendidikan”.

Pendapat yang sama, Sufyarman (2004) konsep dasar manajemen berbasis sekolah adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat ke pihak sekolah. Dengan adanya pengalihan kewengan tersebut, maka sekolah diharapkan dapat lebih mandiri dan mampu menetukan aqrah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat

Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat di maksudkan agar lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Dzaki (Asmani:2012:39) mengemukakan:

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyeresaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh seklolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau mencapai tujuan pendidikan nasioanl.

Dan Mulyasa (Fattah, 2011:24-25) MBS dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan, seperti:

1. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru.
2. Bertujuan bagaiman memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.
4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubaan perencanaan.

Di Indonesia dalam penerapan MBS, mulai dari perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi, kita tidak perlu meniru secara persis model-model MBS yang digunakan oleh negara lain, cukup dengan belajar dengan pengalaman-pengalaman pelaksanaan MBS di Negara lain, kemudian memodifikasi, merumuskan, dan menyusun model dengan mempertimbangkan berbagai kondisi .

Jadi MBS adalah konsep yang menggambarkan perubahan formal struktur penyelenggaraan sekolah, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting.

1. **Prinsip manajemen berbasis sekolah**

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS, Usman (2009:624). antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS.
2. Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.
3. Keterlibatan, pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.
4. Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.
5. Keputusan, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tantang pendidikan.
6. Kesadaran, guru-guru harus harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam dalam pembatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.
7. Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.
8. Ketahanan, perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan *stakeholders* sekolah.

Pada dasarnya prinsip MBS bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui pengambilan keputusan bersama, berdasarkan prinsip tersebut bahwa sekolah harus mengembangkan seluruh potensi-potensi yang ada dalam menghadapi berbagai macam problematika yang ada pada sekolah tersebut, dan untuk mencapai keseluruhan proses tersebut harus ada dukungan dari berbagai macam pihak agar program yang akan dijalankan dapat terealisasikan.

1. **Tujuan manajemen berbasis sekolah**

Tujuan penerapan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, guru maupun tenaga kependidikan lainya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitas bukan hanya meningkatnya pengetahuan dan keterampilannya, melainkan meningkatkan kesejahteraannya pula.

Pada hakikatnya muara penerapan MBS adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, baik menyangkut kualitas pembelajaran, kurikulum, sumber daya manusia maupun tenaga kependidikan lainnya, dan pelayanan pendidikan.

Asmani (2012:49) Keuntungan-keuntungan penerapan MBS sebagaimana dikutip dari hasil pertemuan MBS sebagaimana dikutip dari hasil pertemuan *The American Association of School Administrasion, The National Association of Elementari School Principal, The National of Secondary School Principal* pada tahun 1998, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai formal MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang yang bekerja disekolah
2. Meningkatkan moral guru
3. Keputusan yang diambil sekolah mengalami akuntabilitas. Hal ini terjadi konstituen sekolah mengalami andil yang cukup dalam setiap pengambilan keputusan
4. Menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah.
5. Menstimulasi munculnya pemimpin baru sekolah. Keputusan yang diambil pada tingkat sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran seorang pemimpin.
6. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam rangka mencapai kebutuhan sekolah.

MBS bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui pengambilan keputusan bersama. Fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan pelayanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan orang tua siswa serta harapan sekolah dalam membangun keunggulan kompetitif dengan sekolah sejenis.

Oleh itu karena tujuan MBS adalah meningkatkan mutu keputusan untuk mencapai tujuan, maka pelaksanaan MBS memerlukan tujuan yang hendak dicapai serta jelas, jelas indikatornya, jelas kriteria pencapaiannya agar keputusan lebih terarah. Lebih dari itu, dengan proses pengambilan keputusan bersama harus sesuai dengan kepentingan siswa belajar. Dilihat dari sisi standarisasi, maka penerapan MBS berarti meningkatkan standar kinerja belajar siswa melalui pengambilan keputusan bersama, meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kontrol dan evaluasi agar leih akuntabel.

1. **Manfaat manajemen berbasis sekolah**

MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pembimbing pendidikan di sekolah. Melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi pesertadidik dapat di maksimalkan melalui penningkatan partisipasi orangtua, misalnya orangtua dapat mengawasi secara langsung proses belajar menjagar yang di jalankan di sekolah.

Sejalan dengan penjelasan tersebut Asmani (2012:54) manfaat MBS akan menghasilkan nilai positif bagi sekolah, antara lain sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas
3. Pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal :
4. Menetapkan sasaran peningkatan mutu
5. Menyusun rencana peningkatan mutu
6. Melaksanakan rencana peningkatan mutu
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu
8. Penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas
9. Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi
10. Dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab
11. Menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif.

Kejelasan indikator dan kriteria mutu pada pencapain tujuan akan memandu sekolah memformulasikan stratergi, mengimplementasikan strategi dan mengukur pencapain kerja.

Dacholfany dan Yuzana (Asmani:2012:55), penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut:

1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting .
3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Berdasarkan manfaat MBS di atas, maka manfaat MBS itu sendiri dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sekolah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan selain itu juga masyarkat serta komite sekolah berkesempatan untuk turut terlibat dalam pengelolaan sekolah sehingga komite sekolah dan masyarakat memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap sekolah yang berpengaruh pada peningkatan mutu sekolah.

1. **Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS**

Ciri-ciri MBS, bila dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar mengajar dan sumber daya. Daryanto dan Farid (2013:178) Ciri sekolah yang melaksanakan MBS yaitu:

1. Upaya peningkatan peran komite sekolah, masyarakat, untuk mendukung kinerja sekolah
2. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
3. Menerapkan prinsip efektivitas dan efesiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil, dan fasilitas)
4. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
5. Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab semua lapiasan masyarakat sebagai pengguna sekolah
6. Meningkatkan profesionalisme semua personil sekolah.
7. Lebih meningkatkan kemandirian sekolah dalam segala bidang.
8. Adanya keterlibatan semua unsur yang terkait dalam peningkatan kualitas dan kuantitias sekolah (kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat).
9. Adanya keterbukaan dalam setiap penggelolaan yang akan di kelolah dalam sekolah.

Jadi pada dasarnya ciri MBS adalah bagaimana sekolah itu dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar seluruh proses yang akan dijalankan dapat terealisasikan. Dengan MBS di harapkan terjadi demokratisasi, partisipasi, dan aktualisasi dari seluruh elemen pendidikan. Kepemimpinan yang demokratis, pengambilan keputusan secara kolektif dan kolegial, serta keterlibatan semua elemen dalam pelaksanaan maka program akan berjalan secara maksimal.

1. **Pilar manajemen berbasis sekolah**

MBS pada hakikatnya merupakan pemberian otonomi kepada sekolah untuk secara aktif serta mandiri mengembangkan dan melakukan berbagai macam program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas sksistensinya. *Peningkatan mutu, kemandirian, partisipasi*, dan *transparansi* merupakan empat pilar penerapan MBS di sekolah.

Bafadal (2006:93-94) menegaskan empat pilar tersebut yaitu:

1. Pilar Mutu dalam MBS

Peningkatan mutu MBS merupakan satu pendekatan manajemen yang menempatkan mutu pendidikan sebagai “kiblat” aktivitas menajemen kurikulum, kesiswaan, kepegwaian, sarana dan prasarana, keuangan, dan peran serta masyrakat seklah.

1. Pilar kemandirian dalam MBS

Sebagai pilar kedua MBS adalah kemandirian. MBS merupakan sebuah model pengelolaan sekolah yang sangat menuntut adanya kemandirian seluruh personel sekolah untuk maju dengan sendirinya. Oleh karena itu, konsep-konsep mengelola sendiri (*self-managing*), merencanakan sendiri (*self-planning*),mengorganisasikansendiri aktivitassekolah(*Selforganizing*),mengarahkansendiri(*self-direction*), dan mengontrol/mengevaluasisendiri seluruh program sekolahyang telah dilaksanakan (*self-control*) sangat melekat pada konsep MBS.

1. Pilar Partisipasi dalam MBS

Partisipasi dalam konsep MBS merupakan satu model pengelolaan sekolah yang sangat menekankan pada partisipasi seluruh elemen terkait dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah. Elemen yang dimaksud tidak saja dalam bentuk partisipasi orang tua, melainkan juga masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lembaga-lembaga sosial yang lain.

1. Pilar tranparansi dalam MBS

Merupakan satu model pengelolaan sekolah yang menuntut adanya transparansi keuangan. Trasparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, pilar MBS yang sangat menentukan keberhasilan implementasi MBS di sekolah. Kemandirian sekolah tidak bisa terlepas dari profesionalisme manajerial dan kerja sama dengan komite sekolah, disinilah letak pentingnya manajemen hubungan sekolah dengan komite sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan kuliatas sekolah.

1. **Strategi implementasi MBS**

Untuk berhasilnya implementasi MBS, sudah menjadi tanggungjawab semua komponen sekolah, termasuk masyarakat dan pemerintah, Mulyasa (Andang 2014:131) mengemukakan bahwa “MBS dapt efektif dalam implementasi apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan dukungan masyarakat yang tinggi”. Persoalan utama yang dihadapi dalam implementasi MBS adalah kurang siapnya sumber daya manusia terutama dalam memahami esiensi penerapan MBS, termasuk kepala sekolah, kepala sekolah kurang memiliki kemampuan mengelolah atau memanfaatkan sumber daya yang ada untuk diarahkan pada pengembangan dan kemjuan sekolah.

Andang (2014:132) strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk berhasilnya pelaksanaan MBS pada tingkat sekolah antara lain:

1. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahunan dan keterampilan yang berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.
2. Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pebiayaan maupun pengambil keputusan.
3. Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu menggerakkan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara efektif terutama kepala sekolah.
4. Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah.
5. Semua pihak harus memenuhi peran dan tanggungjawab secara sungguh-sungguh.

Dari pendapat tentang strategi diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilalukan supaya berhasil dalam penrapan MBS yaitu adanya otonomi yang luas yang diberikan kepada sekolah, adanya dukungan dari masyarakat, dan pemimpin harus demokratis dalam pengambilan keputusan.

Dan Wohlstte dan Mohrman (Andang 2014:133) menyatakan terdapat empat macam kegagalan dalam pelaksanaan MBS antara lain:

1. Penerapan MBS hanya sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa upaya kreatif.
2. Kepala sekolah bekerja berdasarkan agendaya sendiri tanpa memerhatikan aspirasi seluruh anggota dewan sekolah.
3. Kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak dan cenderung semena-mena.
4. Menganggap bahwa MBS adalah hal biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya.

Dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan MBS adalah tidak adanya upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melakukan perubahan yang dilakukan secara kreatif dan pengambilan keputusan yang tidak demokratis dan hanya terpusat pada satu pihak saja.

Mulyasa (2002) Hal yang paling penting dalam implementasi MBS manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri, dan harus dikelolah dengan baik dalam rangka MBS, yaitu:

1. Manajemen kurikulum

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegitan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan pada umumnya telah dilakukan oleh departemen pendidikan nasional pada tingkat pusat. Oleh karena itu, sekolah juga bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Untuk menjamin efektifitas pengembagan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS. Kepala sekolah sebagai pengelolah program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, adapun program mingguan atau program satuan pelajaran,wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar.

Menurut Dakir (2004:3) kurikulum adalah:

Suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirangcankan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan penddikan.

Rusman (2009:3) kurikulum adalah

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dan Menurut Mustari (2014:56) manajemen kurikulum adalah:

Pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mrngajar istilah sekarang pembelajaran agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil maksimal.

Dari pendapat para ahli mengenai pengertian kurikulum dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan kegiatan yang terencana mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran secara sistemik dengan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan.

Terdapat ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Rusman (2009:4) yaitu bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah, lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.

Rusman (2009:4) terdapat lima prinsip yang harus di perhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajmen kurikulum.
2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas, dan efesiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi untuk mencaoai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Dan ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum menurut Rusman (2009:5) diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan ektrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelolah secara intergritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun efektifitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yamg profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
5. Miningkatkan efesiensi dan efektifitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perli disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

Dari pendapat diatas mengenai prinsip dan fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen kurikulum perlu mengacu pada produktifitas, demokrasi, kerjasama positif dari berbagai pihak yang terlibat, efektif dan efisien, dan mengarah pada visi misi dan tujuan kurikulum. Dan fungsi manajemen kurikulum mengarah pada memanfaatkan sumber daya dan komponen kurikulum, kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan peserta didik, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan kinerja guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan kerjsama masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum.

1. Manajemen kesiswaan

Pengertian manajemen kesiswaan secara umum menurut beberapa ahli berikut:

Menurut Knezevich (Imron, 2012:6):

Manajemen Kesiswaan atau *pupil personnel administration* adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan ,dan layanan siswa dikelas dan diluar kelas seperti : pengenalan, pendaftaran, layanan, individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat sampai ia matang disekolah.

Sutopo dan Suemanto (Prihatin, 2011:6) menyebutkan bahwa :

Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktifitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa sampai keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah atau lembaga.

Dan Mulyasa (2002:46) berpendapat bahwa:

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegitan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah.

Dari pengertian beberapa pakar di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa dan seluruh proes kegiatan direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap seluruh siswa agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan sampai keluarnya siswa dari sekolah.

Tujuan umum Manajemen kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar disekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar disekolah dapat berjalan lancar, tertib, teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Prihatin (2011:9) mengemukakan tujuan khusus Manajemen Kesiswaan adalah sebagai berikut .

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor siswa.
2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan), bakat dan minat siswa
3. Menyalurkan aspirasi ,harapan dan memenuhi kebutuhan siswa.

Dengan terpenuhinya hal tersebut diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka.

Manajemen kesiswaan juga bertujuan mengatur berbagai kegitan dalam bidang kesiswaan agar kegitan pembelajaran sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen kesiswaan setidaknya memiliki tigas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan siswa baru, kegitan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.

Dan prinsip-prinsip manajemen kesiswaan adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomani lagi, maka hal itu bukanlah suatu prinsip. Prinsip Manajemen Kesiswaan mengandung arti bahwa dalam rangka memanajemen kesiswaan prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomani. Prihatin (2011:9) mengemukakan prinsip-prinsip Manajemen Kesiswaan sebagai berikut:

1. Manajemen Kesiswaan sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah, sehingga harus mempunyai kesamaan visi,misi,dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan.
2. Segala bentuk kegiatan Manajemen Kesiswaan harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik siswa.
3. Kegiatan Manajemen Kesiswaan harus di uayakan untuk mempersatukan siswa yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan .
4. Kegiatan Manajemen Kesiswaan harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan siswa, disini diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis antara pembimbing dan yang dibimbing atau siswa.
5. Kegiatan Manajemen Kesiswaan haruslah mendorong dan memacu kemandirian siswa. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan siswa haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan Manajemen Kesiswaan.
6. Apa yang diberikan kepada siswa dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan Manajemen Kesiswaan baik di sekolah lebih-lebih di masa depan.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen kesiswaan terdiri dari kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen kesiswaan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan pengembanan visi pendidikan, kegiatan yang dilakukan diupayakan untuk mempersatukan siswa, kegiatan yang dilaksanakan merupakan pengaturan pembimbingan siswa, kegiatan yang dilaksanakan mendorong kemandirian siswa, dan kegiatan yang dilaksanakan dilakukan secara berkelanjutan.

1. Manajemen sapras

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan mengatur dan menjaga sapras agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpananan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

Menurut Mulyasa (2002:49) Sarana pendidikan adalah:

Peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran. Dan adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasaran pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Disamping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.

Menurut Arismunandar (2006:18) Standarisasi manajemen sarana dan prasarana dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketersediaan saran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang meliputi:

Ketersediaan lahan, bangunan, peralatan/media, buku teks dan sarana olahraga. Bangunan sekolah seharusnya meliputi ruang-ruang untuk untuk kepala dan wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, perpustakaan, laboratorium, kamar mandi/WC, ruang UKS, dan ruang kelas dengan ukuran dan kualitas yang memadai, khusus buku teks, rasio yang dipersyaratkan untuk setiap siswa.

Dari pendapat diatas manajemen sarana dan prasarana pendidikan ialah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dan menunjang proses pembelajaran pendidikan, dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasaran pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam mengelolah pendidikan, meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

1. Manajemen humas

Sekolah dengan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efesien, sebaiknya sekolah harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.

Menurut Glen dan Denny (Suryosubroto:2012:12) menyatakan bahwa:

Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, serta menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat pada umumnya.

Ibnoe Syamsi (Suryosubroto:2012:14) humas adalah “kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan harmonis dengan masyarakat agar mereka sadar sukarela mendukungnya”.

Mulyasa (2002:50) Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya adalah:

Suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik disekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat, sekolah dam masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efesien.

Dan menurut Ngalim Purwanto (Suryosubroto:2012:19) humas merupakan:

Hubungan antara sekolah dan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi atau jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat umum, hendaknya semua hubungan tersebut merupakan hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif, yang dapat memberikan keuntungan, kebaikan, dan kemajuan kedua belah pihak.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam humas perlu adanya dukungan dari masyarakat dan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang dapat memberikan keuntungan dan kemajuan kedua belah pihak, baik sekolah maupun masyarakat,

Menurut Mulyasa (2002:50) hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain:

1. Memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak.
2. Memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan.
3. Menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan dengan harmoni antara sekolah dengan masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan meberitahukan masyarkat mengenai program-program sekolah, baik program yang dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan maka sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat ini semakin dirasakan penting pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pendidikan, hubungan kerjasama ini tidak perlu bibina. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentinggnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerjasama yang lebih harmonis

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah dapat di informasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, *open house,* kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, penjelasan oleh staf sekolah, murid, radio dan televisi, serta laporan tahunan.

1. **Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah**
2. **Pengertian manajemen mutu**

Sebelum membahas definisi manajemen mutu, terlebih terlebih dahulu apa pengertian mutu. Mutu (kualitas) meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah, misalnya apa yang dianggap berkualitas (bermutu) saat ini mungkin dianggap berkualitas (bermutu) pada masa mendatang.

Menurut Willy Susilo (2003:9-10) manajemen mutu adalah:

Upaya sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, atau pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua unsur organisasi, baik internal maupun eksternal yang tercakup dalam dimensi material, metode, mesin, dana, manusia, lingkungan dan informasi untuk merealisasikan komitmen, kebijaksanaan dan sasaran mutu yang telah diterapkan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk masa sekarang maupun di masa depan.

Minarti (Asmani, 2012:116) manajemen mutu sekolah yaitu:

Suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sekolah, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif-kualitatif, serta memberdayakan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu adalah sesuatu yang sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua unsur organisasi baik internal maupun eksternal dan memberdayakan semua komponen sekolah guna memberikan kepuasan pada pelanggan.

1. **Pengertian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah**

Depdikbud (Mulyasa, 2011) mengartikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, dan pegawai) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya). Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tidak boleh menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Nurkolis (2003) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah:

Sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional serta perundang-undangan yang berlaku

Dan Calwell dan Spinks (Mulyasa, 2011:177) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan:

Sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepala sekolah untuk mengatur kehidupannya sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Dalam MPMBS sekolah merupakan institusi yang memiliki “*Full authority and Responsibility”* untuk secara mandiri menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah.

Sedangkan Mulyasa (2011:178-179) mengemukakan ada beberapa ciri-ciri sekolah yang mandiri sebagai berikut:

Tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan randah, bersifat adaptif dan antisifatif/proaktif sekaligus, memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya), bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sekolah perlu memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelolah sekolahnya dengan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sekolah.

1. **Tujuan dan manfaat MPMBS**

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efesiensi mutu dan pemerataan pendidikan diIndonesia. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipaso orang tua siswa terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah, terhadap kepegawaian.

Mulyasa (2011:179) tujuan MPMBS antara lain:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiataf sekolah dalam mengelolah dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
4. Meningkatkan kompetesi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Sedangkan Subakir (2001) mengemukakan tujuan MPMBS adalah “meningkatkan efesiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan luas bagi sekolah untuk mengelolah sekolahnya sendiri”. Sedangkan tujuan MPMBS adalah untuk memberdayakan sekolah terutama sumber daya insani melalui pemberian kewenangan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan MPMBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemandirian sekolah, dan partisipasi masyarakat bagi pencapaian mutu sekolah yang berkualitas.

Sedangkan manfaat MPMBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab dengan adanya otonomi yang memeberikan tanggungjawab pengelolaan sumberdaya dan pengembangan strategis MPMBS sesuai dengan kondisi, keleluasaan dalam mengelolah sumber daya dalam menyertakan masyarakat untuk berpastisipasi, mendorong profesionalisme guru, kepala sekolah dalam perannya sebagai kepala sekolah. Menurut Nurkolis (2003) manfaat MPMBS yang terkait langsung dengan otonomi sekolah yaitu: (1) kurikulum yang bersifat inklusif, (2) proses mengajar lebih efektif, (3) lingkungan sekolah yang mendukung, (4) sumber daya yang berasas pemerataan, (5) standarisasi dalam hal-hal tertentu seperti monitoring, evaluasi dan tes.

Dengan demikian manfaat MPMBS menitikberatkan pada kebebasan, dan kekuasaan otonomi kepada sekolah disertai dengan tanggungjawab dari pihak warga sekolah maupun orang tua siswa dan masyarakat luas untuk pencapaian sekolah pendidikan yang berkualitas.

1. **Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah**

Jika manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan wadah, maka sekolah efektif adalah isinya. Oleh karena itu, karakter manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi input proses, dan output. (Depdiknas, 2001b), menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan pada umumnya, output diklafikasikan menjadi dua yaitu berupa prestasi akademik dan output berupa prestasi berupa non akademik. (1) output yang diharapkan, (2) proses yang diharapkan, (3) input pendidikan yang diharapkan, (4) fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah. Dan Mulyasa (Andang 2014:128) telah mengidentifikasi beberapa karakteristik MBS/MBM sebagai berikut: (1) pemberian otonomi luas kepada madrasah, (2) tingginya partisipasi pada masyarakat dan orang tua, (3) kepemimpinan yang demokrasi dan profesional, dan (4) *team work* yang kompak dan transparan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik manajemen berbasis sekolah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan dalam keadaan sekolah yang kemudian keaadaan tersebut diberikan kepada sekolah untuk memanajemen sekolahnya sendiri agar sekolah lebih mandiri.

1. **Langkah-langkah pelaksanaan program MPMBS**

Sekolah yang akan melaksanakan manajemen mutu pendidikan barbasis sekolah perlu memahami konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dan melaksanakan beberapa langkah pokok dalam manajemen sekolah. Menurut Depdiknas (2001b), beberapa langkah-langkah implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) menyusun rencana peningkatan mutu. Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. (2) melaksanakan rencana peningkatan mutu. Dalam melaksanakan rencana program peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, maka sekolah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan target-target yang diterapkan. Kepala sekolah dan guru hendaknya memberdayakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin. Dan bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program kegiatan yang diproyeksikan dapat membebaskan diri dari keterikatan birokrasi yang biasanya banyak menghambat penyelenggaraan pendidikan. (3) melakukan evaluasi pelaksanaan. Sekolah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan dilakukannya evaluasi akan diketahui kelebihan dan kelemahan program untuk memperbaiki tahun-tahun berikutnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah pelaksanaan MPMBS perlu dilakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan kegiatan MPMBS, kemudian melakukan pelaksanaan perencaan dan yang kemudian dilakukan evaluasi pelaksaan dan target mutu baru. Dengan penerapan MBS, masyarakat peduli pendidikan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam program pelaksanaan program pendidikan

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat MPMBS**

Deliza (2012) mengemukan faktor pendukung pelaksanaan program kerja MPMBS adalah: (1) sarana dan fasilitas yang mencukupi, (2) jumlah dan kualifikasi guru yang memadai, (3) faktor siswa yang unggul, (4) dukungan kemitraan dari masyarakat khususnya orang tua siswa, dan (5) Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki visi, membangun team work, dan mebangkitkan semangat. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program MPMBS yaitu: (1) ada sebagian guru kurang disiplin serta kurang memahami tugas profesinya, (2) masih terbatasnya sarana dan prasarana khususnya peralatan dan komputer, (3) dukungan masyarakat dan orang tua siswa belum optimal, (4) sebagian orang tua siswa kondisi ekonominya lemah, maka dukungan dana juga tidak maksimal.

Uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi MPMBS adalah adanya pemimpin yang memiliki pemikiran untuk mengembangkan sekolahnya, jumlah guru yang memadai. Dan faktor penghambatnya adalah kurangnya kerjasama antar warga sekolah, terbatasnya sarana dan prasarana sekolah khususnya peralatan komputer

Menurut Mulyasa (2011:179-180) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) perlu diterapkan oleh setiap sekolah, terutama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efesien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.
6. Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umunya, sehingga dia berupa maksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
7. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendididkan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
8. Sekolah dapat secara cepar merespons aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat

Implementasi MPMBS berimplikasi terhadap berbagai kegiatan sekolah, hal utama yang paling menonjol dan harus menjadi karakteristik adalah munculnya sekolah yang berkemampuan unggul. Peningkatan kualitas pengelolaan sekolah dengan latar MPMBS merupakan proses keseluruhan dalam suatu organisasi, berjalan secara nyata, jangka panjang membudaya, baik bagi personil, pemimpin maupun bagi peserta didik.

1. **Kerangka Pikir**

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pemberian otonomi yang diberikan kepada sekolah agar lebih mandiri dalam mengelolah sekolahnya sendiri dan mengambil kebijakan, dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tidak lepas dari masalah dan hambatan dalam pelaksanaannya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan fokus demikian, diharapkan dapat tergambar implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone.

Dari uraian di atas, maka secara skematis alur pola pikir tergambar sebagai berikut:

**Implementasi MPMBS**

* Menyusun Rencana Peningkatan Mutu
* Melaksanakan Peningkatan Mutu
* Evaluasi Peningkatan Mutu

**Mutu SMA Negeri 1 Tellusiattinge**

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap data atau informasi sebanyak mungkin mengenai implementasi MPMBS di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Data atau informasi tersebut meliputi: implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa gejala dalam penelitian ini merupakan proses implementasi MPMBS. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah penilitian kualitatif yaitu penilitian yang mengungkapkan fakta yang ada di lapangan dengan pengamatan dan wawancara serta menggunakan data kepustakaan. Pemilihan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada fenomena yang akan diteliti yaitu ingin memberikan gambaran implemetasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellusiattinge Kabupaten Bone.

47

1. **Kehadiran Peneliti**

Sugiyono (2013) dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan, selain itu peneliti juga mutlak memiliki beberapa persyaratan sebagai instrumen agar data yang di kumpulkan valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di lapangan, karena peneliti merupakan instrumen penelitian utama yang memang harus hadir sendiri secara langsung dilapangan untuk mengumpulkan data. Dalam memasuki lapangan peneliti harus bersikap hati-hati terutama terhadap informasi kunci agar tercipta suasana yang mendukung keberhasilan dalam pengumpulan data.

Peneliti kualitatif harus menyadari benar bahwa dirinya merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisa data. Sehingga peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Hubungan yang baik antara peneliti dengan subjek penelitian sebelum dan sesudah memasuki lapangan, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap dalam melakukan pengumpulan data.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tellu Siattinge Kabupaten Bone, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dalam bentuk pengajuan wawancara.

1. **Sumber Data**

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian, maka diperlukan adanya subjek atau informan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah 4 orang yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 2 guru. Sumber tertulis, sumber data yang menyajikan data berupa tulisan-tulisan dan arsip-arsip.

1. **Prosedur Pengumpulan Data**
2. **Metode Observasi**

Teknik tersebut merupakan teknik pelengkap dalam pengumpulan data awal. Becker dkk (Sugiyono, 2013) menyatakan observasi merupakan proses pengamatan terhadap sebjek penelitian pada realitas kehidupan yang alamiah, yaitu kehidupan yang dijalani subjek sehari-hari. Teknik observasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang MPMBS dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan melihat dan merasakan fenomena terhadap MPMBS yang terjadi di SMA Negeri 1 Tellusiattinge Kabupaten Bone.

1. **Metode Wawancara**

Penggunaan wawancara dimaksudkan memperoleh informasi dan keterangan keterangan tentang implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellusiattinge, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan implemetasi MPMBS di SMA Negeri 1 Tellusiattinge. Adapun yang diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara verbal kepada responden yang merupakan subjek penelitian.

Bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur, wawancara berstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data, wawancara tak berstruktur yakni wawancara di lakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.

1. **Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi untuk mencermati program MPMBS yang tertuang dalam proposal MPMBS, fasilitas yang dimiliki sekolah, dan sebagainya yang terhimpun dalam profil sekolah.

1. **Analisi Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif aspek proses lebih ditekankan dari pada hasil, dan penelitian kualitatif mempunyai medan yang alami sebagai sumber data langsung sehingga besifat deskriptif. Setelah berbagai data masih “mentah” kemudian di edit dan dipilah-pilah. Data-data kualitatif yang dikumpulkan dengan wawancara dokumentasi.

Sugiyono (2013) mengemukakan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yakni: reduksi data,penyajian data, dan verifikasi.Kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun suatu analisis yang tangguh.

Jadi dalam proses analisis kualitatif terdapat tiga kegiatan utama yang saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis model interaktif, artinya analisis ini dilakukan dan bentuk interaktif dari ketiga komponen utama tersebut, tiga komponen tersebut digambarkan sebagai berikut:

*Sumber: Miles dan Huberman (Bunging. 2003:97). Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif*

Gambar 3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstratan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data juga dimaksudkan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Sementara itu, penyajian data merupakan bagian dari analisis, dengan maksud agar data atau informasi yang telah terkumpul dapat tersusun dalam bentuk yang padu. Bentuknya dapat berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dengan bentuk yang padu, akan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan.

1. **Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan trianggulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari (Sugiyono, 2013).

Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut.

1. **Tahap-tahap Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : 1. tahap sebelum ke lapangan, 2. tahap pekerjaan lapangan, 3. tahap analisis data, 4. tahap penulisan laporan”. Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

1. Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat peneliti, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan MPMBS sekolah di SMA Negeri 1 Tellusiattinge Kabupaten Bone. Data tersebut diperoleh dengan wawancara dan observasi.
3. Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperolah melalui dokumen maupun wawancara yang mendalam dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan, meliputi: kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan skripsi yang kemudian ditindaklanjuti. Langkah terakhir melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk ujian skripsi.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. **Hasil Penelitian**
2. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, pada bagian ini peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan lokasi penelitian.

1. Profil SMA Negeri 1 Tellusiattinge

Sekolah ini berdiri pada tahun 1994 dan mulai menerima siswa pada tahun 1994. Sekolah yang pernah masuk RSBI ini kini memiliki 20 kelas, yakni kelas I dan II masing-masing 7 kelas, dan kelas III sebanyak 6 kelas. SMA Negeri 1 Tellusiattinge dipimpin oleh kepala sekolah Drs. Syamsul Alam, M. Pd kini menyandang sekolah akreditasi A dan memiliki sertitifikat SNI ISO 9001:2008.

Seiring dengan semakin meningkatnya tamatan SLTP di daerah kecamatan Tellusiattinge dan sekitarnya, sekolah ini mengalami pula perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 membuka kelas jauh di kecamatan Dua Boccoe yang sekarang memisahkan diri menjadi SMAN 1 Dua Boccoe.

55

1. Letak Geografis SMA Negeri 1 Tellusiattinge

SMA Negeri 1 Tellusiattinge terletak di Kelurahan Tokaseng Jl. Poros Bone Wajo Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone. Lokasi SMA ini letaknya mudah dijangkau karena berada di jalan poros. Adapun letak SMA Negeri 1 Tellusiattinge dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Pemukiman warga
2. Sebelah Utara : Kebun warga
3. Sebelah Timur : Pemukiman warga
4. Sebelah Selatan : Jalan poros Bone-Wajo
5. Visi, Misi SMA Negeri 1 Tellusiattinge

Visi dan misi merupakan landasan awal dalam merumuskan program-program yang telah di rencanakan. Visi memberikan gambaran masa depan suatu organisasi, dia berperan sebagai pemberi arahan dan motivasi kepada semua warga sekolah. Misi adalah penjabaran dari visi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi berperan untuk mengenalkan seekolah terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun Visi, Misi SMA Negeri 1 Tellusiattinge, yaitu sebagai berikut:

Visi: Profesional dalam layanan serta berprestasi dengan semangat kerjasama dan keteladanan sekaligus mengantar siswa menguasaai IPTEK yang bernuansa IMTAQ untuk meraih kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.

Misi SMA Negeri 1 Tellusiattinge:

1. Membina siswa berdasarkan keimanan dan ketaqwaan
2. Mengembangkan layanan profesional dalam kerjasama dan keteladanan
3. Meningkatkan prestasi belajar siswa
4. Memberdayakan kemitraan masyarakat melalui peran komite sekolah untuk peduli terhadap pendidikan
5. Memelihara semangat kebersamaan, demokrasi serta inovatif pendidikan
6. Mengantar siswa meraih prestasi demi kebahagiaan masa depan dan kemuliaan hidup

Tujuan SMA Negeri 1 Tellusiattinge:

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa
2. Memberikan pelayanan profesional melalui kerjasama dan keteladanan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi secara nasional dan internasional
3. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam rangka berkompetensi secara nasional dan internasional
4. Memberdayakan kemitraan melalui peran komite sekolah untuk peduli terhadap pendidikan secara nasional dan internasional
5. Memelihara semangat kebersamaan, demokrasi serta inovatif pendidikan secara nasional dan internasional
6. Mengantar siswa meraih prestasi secara nasional dan internasional demi kebahagiaan masa depan dan kemuliaan hidup
7. Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Tellusiattinge

Jumlah siswa SMA Negeri 1 Tellusiattinge dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Tellusiattinge dari Tahun Ajaran 20015/2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kelas | Jumlah | Keterangan |
| X | 224 | Aktif |
| XI | 211 | Aktif |
| XII | 180 | Aktif |
| Jumlah | 615 | Aktif |

Sumber : Arsip data siswa SMA Negeri 1 Tellusiattinge TP. 2015/2016

1. Keadaan Guru/Pegawai SMA Negeri 1 Tellusiattinge

Guru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru berkewajiban menyajikan dan menjelaskan pelajaran, membimbing, dan mengarahkan siswa ke arah pencapaian tujuan pengajaran, dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kualitas dan kapasitas guru merupakan faktor yang paling penting sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Adapun jumlah guru dan pegawai SMA Negeri 1 Tellusiattinge adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Keadaan Guru dan Pegawai Pada SMA Negeri 1 Tellusiattinge Tahun Pelajaran 2015/2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Guru/Staf | Jumlah | Keterangan |
| Guru Tetap | 33 | Aktif |
| Guru Honor Sekolah | 12 | Aktif |
| Staf Tata Usaha | 18 | Aktif |
| Jumlah | 63 |  |

Sumber : Arsip data Guru dan Pegawai SMA Negeri 1 Tellusiattinge TP. 2015/2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guru dan pegawai yang bertugas di SMA Negeri 1 Tellusiattinge sebanyak 63 orang, semuanya masih aktif mengajar di SMA Negeri 1 Tellusiattinge dan masing-masing guru mempunyai peran dan tugas yang sama dalam hal mendidik dan membimbing siswa.

1. Keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Tellusiattinge

Sarana prasarana sangat penting dalam menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Alat peraga atau alat pembelajaran merupakan faktor penunjang yang penting. Hal ini untuk mempermudah pembelajaran siswa terhadap pelajaran yang dipelajari. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Negeri 1 Tellusiattinge adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Keadaan Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 1 Tellusiattinge

Tabel 4.3. Keadaan Sarana Dan Prasarana SMA Negeri 1 Tellusiattinge

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Keterangan |
| 1 | Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 2 | Tata Usaha | 1 | Baik |
| 3 | Guru | 1 | Baik |
| 4 | Kelas | 20 | Baik |
| 5 | Laboratorium Kimia | 1 | Baik |
| 6 | Laboratorium Biologi | 1 | Baik |
| 7 | Laboratorium Bahasa | 1 | Baik |
| 8 | Perpustakaan | 1 | Baik |
| 9 | Ruang TRC | 1 | Baik |
| 10 | Multimedia | 1 | Baik |
| 11 | Gudang | 1 | Baik |
| 12 | WC | 2 | Baik |
| 13 | Ruang Komputer | 1 | Baik |
| 14 | Kafetaria | 1 | Baik |

Sumber: Arsip data keadaan sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Tellusiattinge TP 2015/2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 Tellusiattinge sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik dalam menunjang segala aktivitas di sekolah tersebut.

1. **Penyajian Dan Analisis Data**

Penyajian dan analisis data ini dimaksudkan untuk memaparkan atau menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian, yaitu yang berhubungan dengan studi tentang manjemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri Tellusiattinge. Kemudian data yang terkumpul dianalisis agar mendapat gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mendapat data dilapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menggunakan metode wawancara, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, dan guru. Selanjutnya pada metode observasi , peneliti menggunakan lembar observasi untuk mengecek kebenaran data yang ada di lapangan.

1. **Analisis Implementasi MPMBS di SMA Negeri 1 Tellusiattinge**

Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik lembaga tersebut berada di bawah naungan pemerintah (negeri) atau mandiri (swasta), tingkat dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, tentu memerlukan adanya manajemen yang bagus (efektif dan efisien). Karena dengan adanya manajemen yang bagus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan di sekolah tersebut.

Depdikbud (Mulyasa, 2011) mengartikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, dan pegawai) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya). Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tidak boleh menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, sangat dibutuhkan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah agar dapat bersaing di dunia globalisasi, dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah terdapat beberapa langkah-langkah, langkah-langkah tersebut terlalu luas, oleh karena itu peneliti hanya menggunakan langkah-langkah bagaimana menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan peningkatan mutu, melakukan evaluasi dan merumuskan target mutu baru.

1. **Menyusun Rencana Peningkatan Mutu**

Rencana ini harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus melaksanakan, kapan, dan dimana dilaksanakan, serta berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

1. Menyusun rencana program kerja

Pada kegiatan ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala SMA Negeri 1 Tellusiattinge yakni bapak SA mengenai rencana menyusun program kerja dan siapa saja yang dilibatkan. Adapun hasil wawancanya yaitu:

Dalam melaksanakan program kerja di SMA Negeri 1 Tellusiattinge, sebelumnya kami menyusun suatu rencana program kerja, sebelum kami melaksanakan program kerja tersebut pertama kami melakukan rapat, yang melibatkan semua unsur guru, tata usaha, komite sekolah dan pemerintah kabupaten sebelum kami melakukan program kerja tahunan. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016)

Pernyataan kepala sekolah menunjukkan bahwa sebelum melaksankan program kerja, pertama kepala sekolah melakukan rapat dengan melibatkan semua unsur guru, wakasek dan unsur yang terlibat dengan kegiatan yang akan dilakukan. Hal senada yang diungkapkan wakil kepala sekolah yaitu bapak SM. Berikut petikan wawancaranya:

Iya, jadi setiap tahun pelajaran, kepala sekolah menyusun rencana ada setengah tahun ada satu satu tahun, kepala sekolah memberikan tugas kepada wakil kepala sekolah untuk ikut dilibatkan dalam menyusun rencana tersebut. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Dari pernyataan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan program kerja, kepala sekolah melibatkan semua unsur termasuk wakil kepala sekolah dalam menyusun program kerja, pernyataan juga di ungkapkan oleh guru yaitu bapak ST dan ibu MN. Berikut petikan wawancaranya:

“Iya, kepala sekolah melakukan rapat terlebih dahulu dan melibatkan semua unsur guru tentang program apa yang akan dilaksanakan”. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Dari pernyataan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau program kerja kepala sekolah terlebih dahulu melakukan rapat dengan melibatkan wakasek, semua unsur guru.

Selain wawancara dan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 saat wawancara untuk memperkuat hasil wawancara yang di lakukan. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun rencana program kerja pihak sekolah terlebih dahulu melakukan rapat dengan melibatkan wakil kepala sekolah, semua unsur guru, tata usaha, komite sekolah untuk pembagian tugas.

1. **Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu**

Dalam melaksanakan rencana program peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama antara sekolah, maka sekolah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan target-target yang diterapkan.

1. Program kerja

Pada pelaksanaan program kerja sekolah, kepala sekolah melakukan pembagian program kerja yang akan dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut petikan wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge, bapak SA yaitu:

Dalam pelaksanaan program kerja kami melibatkan semua unsur sesuai dengan apa yang sudah kami tetapkan sebelumnya di dalam rapat, dan kami melaksankan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing misalnya dalam pelatihan pramuka dan maupun kegiatan lain. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016)

Hal senada diungkapkan oleh bapak SM selaku wakil kepala sekolah yang menerima kewengan oleh kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja sekolah, berikut petikan wawancaranya:

Kami diberikan hasil print out untuk dipelajari tentang program apa yang akan dilaksanakan, dan berikan kewenangan siapa-siapa yang berhak menerima kewenangan seperti dibidang kurikulum, pelaksanaannya setiap tahun pelajaran apa yang ada dalam format program kerja, begitu pun dalam bidang kesiswaan, humas, dan sapras, dan dilaksanakan pada priode tertentu. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu guru SMA Negeri 1 Tellusiattinge bapak ST, berikut petikan wawancaranya:

“Iya tentu, dan semua program yang akan dilaksanakan oleh kepala sekolah sudah ada tanggung jawab di masing-masing bagian yang diberikan kewengan untuk menjalankan program tersebut”. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Dari pernyataan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksaan kegiatan program kerja SMA Negeri 1 Tellusiattinge dilakukan dengan memberikan tanggungjawab atau kewenangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

1. Meningkatkan gairah kerja guru

Untuk meningkatkan mutu sekolah khususnya dalam proses pembelajaran guru perlu memiliki gairah kerja dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti oleh dari informan yaitu bapak kepala sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge (SA) yaitu:

Dengan melakukan kegiatan workshop, seminar, mengikutkan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kegiatan-kegiatan lainnya dan melengkapi alat-alat proses pembelajaran guru, memberikan buku pegangan pada setiap guru, memberikan suatu aplos kepada guru yang berprestasi, dan guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan akan diusulkan naik pangkat dalam dua tahun. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016)

Pernyataan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah memberikan pelatihan atau mengikutkan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan gairah kerja guru. Hal senada diungkapakan oleh guru yaitu ibu MN. Berikut kutipan wawancaranya:

Misalnya kalau ada kegiatan MGMP kita diutus, kita rutin melakukan rapat, dan kepala sekolah selalu mengarahkan guru-guru, selalu memberikan motivasi agar selalu berkembang, dan kepala sekolah biasa masuk mengajar menggantikan guru yang berhalangan masuk, sehingga guru-guru merasa termotivasi untuk mengajar. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016 )

Pernyataan yang sama yang diungkapkan oleh salah satu guru yaitu bapak ST, berikut petikan wawancaranya:

Guru itu kan profesi jadi harus dijalani sebagai hobi/kegemaran, profesional makanya kita harus mengajar dengan baik, dan diikutkan oleh kepala sekolah jika ada panggilan untuk melakukan seminar, diklat baik di kabupaten maupun di provinsi. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Dari hasil wawancara yang diberikan informan kepala sekolah, dan guru maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan gairah kerja guru, kepala sekolah melakukan suatu pelatihan atau mengikutkan pelatihan seminar, Diklat, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kegiatan lain, kepada semua guru agar lebih bergairah atau termotivasi dalam melakukan kewajiban sebagai pendidik untuk meningkatkan mutu sekolah khusunya dalam dalam pembalajaran.

1. **Evaluasi Peningkatan Mutu**

Sekolah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan dilakukannya evaluasi akan diketahui kelebihan dan kelemahan program untuk memperbaiki tahun-tahun berikutnya.

1. Program kerja

Dalam program kerja sekolah perlu dilakukan evaluasi pelaksanaannya untuk mengatahui kelebihan dan kelemahan program yang dilaksanakan sekolah.

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge yaitu bapak SA menunjukkan bahwa evaluasi program kerja dilakukan setiap mingguan, bulanan dan tahunan. Berikut betikan wawancara dengan kepala sekolah (SA):

Saya selaku penanggung jawab, saya melakukan evaluasi setiap mingguan, bulanan dan tahunan, melibatkan wakil kepala sekolah, untuk proses pembelajaran melibatkan bagian kurikulum, untuk kesiswaan melibatkan wakasek kesiswaan, untuk sapras /humas melibatkan bagian humas/sapras dalam melakukan evaluasi, dan kalau ada evaluasi data-data kami melakukan pertemuan berkala apakah mingguan atau bulanan. (Hasil wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016)

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge melakukan evaluasi setiap minggu, setiap bulan dan setiap bulan, dan kepala sekolah melibatkan wakil kepala sekolah dan semua unsur yang terlibat, pernyataan itu dipertegas oleh wakil kepala sekolah yaitu bapak SM, berikut petikan wawancaranya:

Iya, semua wakasek dilibatkan dalam melakukan evaluasi khusunya dalam bidang kurikulum itu sendiri, dan kepala sekolah selalu melakukan rapat mengenai kendala apa yang dialami dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam bidang kurikulum, contoh dalam bidang sarana dievaluasi misalnya barang yang sudah dibeli atau yang dibuat dilakukan pengecekan apakah masih bagus atau tidak. (Hasil wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Pernyataan wakil kepala sekolah mengenai evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dipertegas dengan pernyataan ibu MN selaku guru SMA Negeri 1 Tellusiattinge, berikut petikan wawancaranya:

“Kepala sekolah mengevaluasi sampai dimana program tersebut yang sudah terlaksana, apa hasilnya, dan selalu rutin melakukan pertemuan untuk melakukan evaluasi”, (Hasil wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah melakukan evaluasi pada setiap minggu, bulanan, tahunan dengan melibatkan semua semua unsur seperti wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, biadang sapras/humas. Dan melakukan rapat mengenai program apa yang sudah terlaksana, kendala apa yang dialami dan apa hasilnya.

1. **Faktor pendukung**

Deliza (2012) mengemukan faktor pendukung pelaksanaan program kerja MPMBS adalah: (1) sarana dan fasilitas yang mencukupi, (2) jumlah dan kualifikasi guru yang memadai, (3) faktor siswa yang unggul, (4) dukungan kemitraan dari masyarakat khususnya orang tua siswa, dan (5) Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki visi, membangun team work, dan membangkitkan semangat.

Salah satu hal terpenting untuk meningkatkan suatu sekolah adalah memiliki faktor pendukung seperti sarana yang mencukupi, dana yang cukup, SMA Negeri 1 Tellusiattinge Sudah memiliki sarana yang memadai. Seperti pernyataan bapak kepala sekolah SA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bapak SA peneliti mendapat informasi bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan mutu sekolah adalah sarana, anggaran/dana dan tenaga pendidik/guru yang memadai. Berikut petikan wawancaranya:

“Faktor pendukung dalam meningkatkan MPMBS adalah sarana, anggaran/dana, tenaga pendidik/guru yang memadai”. (Hasil wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016)

Hal senada diungkapkan ibu MN salah satu guru di SMA Negeri 1 Tellusiattunge, berikut petikan wawancaranya:

“Sarana, dana yang cukup memadai harus ada.”. (Hasil wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Selain faktor pendukung seperti sarana, anggaran/dana dan pegawai yang memadai, perlu adanya interkasi dan kerja sama yang baik antara guru, dan perlu adanya pemantauan oleh komite sekolah. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh wakil kepala sekolah yaitu bapak SM, berikut petikan wawancaranya:

“Faktor pendukungnya adalah semua guru/pegawai disekolah mudah menerima apa yang akan dikerjakan, interaksi yang baik antar guru. Komite sekolah yang selalu mematau kegiatan sekolah”. (Hasil wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung meningkatkan mutu sekolah adanya sarana, anggaran/dana yang memadai, adanya interaksi antar guru yang terjalin dengan baik dan yang tidak kalah penting adanya dukungan dari komite sekolah dalam melakukan pemantuan terhadap sekolah.

1. **Faktor Penghambat**

. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program MPMBS yaitu: (1) ada sebagian guru kurang disiplin serta kurang memahami tugas profesinya, (2) masih terbatasnya sarana dan prasarana khususnya peralatan dan komputer, (3) dukungan masyarakat dan orang tua siswa belum optimal, (4) sebagian orang tua siswa kondisi ekonominya lemah, maka dukungan dana juga tidak maksimal.

Untuk meningkatkan mutu suatu sekolah selain faktor pendukung pasti ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanya yaitu adanya faktor penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yaitu bapak SA, mengenai faktor penghambat dalam meningkatkan mutu sekolah. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam meningkatkan mutu SMA Negeri 1 Tellusiattinge faktor penghambatnya tidak ada, karena program kerja tidak bisa berjalan kalau sarana tidak lengkap”. (Hasil wawancara dilakukan pada hari kamis tanggal 24 Maret 2016)

Jawaban berbeda yang diberikan oleh wakil kepala sekolah yaitu bapak SM sedikit berbeda, berikut petikan wawancaranya:

“Yang biasa menjadi penghambat adalah masalah dana yang terlambat terlambat datang/cair, sarana”. (Hasil wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Pernyataan yang juga berbeda diutarakan oleh bapak ST dan ibu MN guru SMA Negeri 1 Tellusiattinge, yaitu:

“Mungkin dari kurangnya dukungan dari orang tua siswa, misalnya dari kegiatan pramuka, karena masih ada orang tua siswa yang kurang mendukung anaknya untuk mengikuti kegiatan perkemahan”. (Hasil wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2016)

Faktor untuk meningkatkan mutu sekolah tidak hanya adanya faktor pendukung saja tapi tidak lepas juga dari adanya faktor- faktor penghambat, pernyataan yang diberikan oleh kepala sekolah yang mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambatnya tidak ada, berbeda yang di ungkapkan oleh wakil kepala sekolah dan guru, wakil kepala sekolah mengatakan yang menjadi faktor penghambatnya adalah keterlambatan cairnya dana/anggaran, namun jawaban yang berbeda juga disampaikan oleh guru yang mengatakan bahwa kurangnya dukungan dari masyarakat. Jadi pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan mutu SMA Negeri 1 Tellusiattinge adalah terlambat cairnya dana/anggaran dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

1. **Pembahasan**

Depdikbud (Mulyasa, 2011) mengartikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepala sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, dan pegawai) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, pengusaha dan sebagainya). Untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tidak boleh menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul dimasyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efesiensi mutu dan pemerataan pendidikan diIndonesia. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui partisipaso orang tua siswa terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah, terhadap kepegawaian.

Langkah-langkah implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) menyusun rencana peningkatan mutu. (2) melaksanakan rencana peningkatan mutu. (3) melakukan evaluasi pelaksanaan. (4) merumuskan target mutu baru.

1. Menyusun Rencana Peningkatan Mutu
2. Menyusun rencana Program kerja

Secara garis besar hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di SMA Negeri 1 Tellusiattinge mengenai menyusun rencana program kerja menunjukan bahwa dalam menyusun program, pihak sekolah terlebih dahulu melakukan rapat dengan melibatkan semua sumber guru, wakil kepala sekolah, pemerintah kabupaten sebelum melaksanakan program tahunan.

Terkait dengan penyusunan program kerja sekolah, kepala sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge sebagai pimpinan tertinggi disekolah tidak sendiri memutuskan dan menyusun program kerja. Kepala sekolah melibatkan semua personil sekolah melalui rapat terlebih dahulu dengan dewan guru, wakil kepala sekolah di semua bidang yang bertanggung jawab langsung terhadap wewenang yang diberikan kepala sekolah.

1. Melaksanakan rencana peningkatan mutu
2. Melaksanakan Program kerja

Dalam melaksanakan program kerja di SMA Negeri 1 Tellusiattinge, pihak sekolah melibatkan semua unsur sesuai dengan apa yang sudah kami tetapkan sebelumnya di dalam rapat, dan kami melaksankan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing misalnya dalam pelatihan pramuka dan maupun kegiatan lain.

Hal ini berdasarkan apa yang diungkapkan juga oleh wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge yang mengatakan bahwa, pihak yang terlibat diberikan hasil print out untuk dipelajari tentang program apa yang akan dilaksanakan, dan diberikan kewenangan siapa-siapa yang berhak menerima kewenangan seperti dibidang kurikulum, pelaksanaannya setiap tahun pelajaran apa yang ada dalam format program kerja, begitu pun dalam bidang kesiswaan, humas, dan sapras, dan dilaksanakan pada priode tertentu.

1. Peningkatan gairah kerja guru

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi disekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge memiliki kewajiban bagaimana cara untuk meningkatkan gairah kerja guru dalam melakukan proses pembelajaran guru dikelas. Pihak sekolah dalam meningkatkan gairah kerja guru yaitu mengikutkan/melibatkan guru dalam kegiatan seminar, DIKLAT, MGMP dan kegiatan-kegitan lain, melengkapi alat-alat yang dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran dikelas, dan memberikan aplos kepada guru yang berprestasi.

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu
2. Evaluasi program kerja

Sekolah perlu melakukan evaluasi pelaksanaan program baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan dilakukannya evaluasi akan diketahui kelebihan dan kelemahan program kerja yang dilaksanakan. Dari hasil wawancara kepada pihak SMA Negeri 1 Tellusiattinge bahwa pihak sekolah melakukan evaluasi program kerja setiap minggu. Setiap bulan dan setiap tahun, dengan melibatkan semua unsur guru, wakil kepala sekolah, dan melakukan rapat mingguan secara berkala, untuk mengetahui sampai dimana program tersebut yang sudah terlaksana, dan apa hasilnya.

1. Faktor pendukung peningkatan mutu sekolah

Faktor pendukung adalah hal-hal yang dapat memenuhi/membantu sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah misalnya dalam hal sapras, dana, dan lain-lain. Faktor pendukung di SMA Negeri 1 Tellusiattinge dari hasil wawancara dalam meningkatkan mutu sekolahnya yaitu sarana, anggaran, pegawai dan guru yang memadai, dan adanya hubungan yang baik atau kerja sama yang baik antar bawahan dan pimpinan.

1. Faktor penghambat peningkatan mutu sekolah

Faktor penghambat adalah faktor yang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tak terkecuali juga program peningkatan mutu disekolah. Pihak sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge juga memiliki faktor penghambat dalam meningkatkan mutu sekolahnya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu, keterlambatan dana yang diperoleh oleh pihak sekolah, masih kurangnya dukungan dari masyarakat.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMA Negeri 1 Tellusiattinge termasuk berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh sekolah, dan meningkatan gairah kerja guru, yang di tunjukkan dengan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari menyusun rencana peningkatan mutu, pelaksanaan peningkatan mutu, dan evaluasi peningkatan mutu, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Walaupun latar belakang pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan namun ada beberapa faktor penentu lain yang dapat membuat proses yang baik yaitu pengalaman dan bimbingan dari pihak pihak tertentu.

1. **Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan yang sudah dilakukan diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah SMA Negeri 1 Tellusiattinge Kabupaten Bone agar mempertahankan dan lebih ditingkatkan lagi mutu sekolah agar dapat bersaing dengan sekolah yang juga sedang berkembang.

77

1. Diharapkan kepada semua pihak yang terlibat di sekolah, komite sekolah, kepala sekolah, guru dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjalankan program kerja dalam upaya peningkatan mutu sekolah.
2. Bagi guru, agar senantiasa meningkatkan gairah kerja dan kapabilitasnya sebagai pendidik agar program yang dilakukan sekolah dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sekolah.
3. Bagi peneliti, agar memperbanyak pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Andang. 2014. *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. Yogyakarta:* Ar-Ruzz Media

Arismunandar. 2006. *Manajemen Pendidikan Peluang dan Tantangan*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar

Asmani, Jamal, M. 2012*. Tips aplikasi Manajemen Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press

Bafadal. 2006. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Bunging, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta

Daryanto. 2013. *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah.* Yogyakarta: Gava Media

Deliza, A. 2012. *Kepemimpinan Kepala Sekolah.* (online). (<http://deliza-aziz.blogspot.co.id/2012/01/kepemimpinan-kepala-sekolah_9863.html>). (diakses tgl 20/10/2015 )

Depdiknas. 2001b. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan.* Jakarta: Dikmenum

Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Bani Quraisy

Hamalik. 1991. *Perencanaan Dan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Mandar Maju

Handoko, T., Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Hasibuan. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Husain, Mucthar. 2011. *Pengantar Administrasi Pendidikan*. Makassar: Badan Penerbit UNM

Imron, A. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Moleong, L. 2004. *Metodologi Penilitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya

Mulyasa. 2002.  *Manajemen Berbasis Sekolah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

----------. 2011. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi aksara

Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Prihatin, E. 2011. *Manajemen Peserta Didik. Bandung*. Bandung: Alfabeta.

Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model, dan Aplikasi.* Jakarta: Gramedia

Rochaety, & Rahayuningsih, P. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara

Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Subakir, S. 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah.* Surabaya: SIC

Sufyarman. 2004. *Kapita Salekta Manajemen Pendidikan.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharsaputra. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

----------------. Dkk., 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan sekolah Menengah (Konsep, Prinsip Dan Instrumen)*. Bandung: PT. Refika Aditama

Suparlan. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara

Suryosubroto. 2012. *Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat (School Public Relations)*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Susilo, Willy. 2003. *Audit Mutu Internal: Panduan Praktis Para Praktisi Manajemen Mutu dan Auditor Mutu Internal*. Jakarta: PT Binamega

*Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Usman, Husaini. 2009*. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

**LAMPIRAN**